

**INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
ADMINISTRASI PUBLIK



Disusun oleh:
DIONESIA DERAN BALI
2017210189

**KOMPETENSI MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

ABSTRAK

Siklus stok, seperti bermacam-macam informasi, pencatatan, dan merinci efek samping dari bermacam-macam informasi pada properti lokal ialah penting bagi organisasi. Konsekuensi dari siklus akuntansi dan stok diperlukan dalam menyelesaikan proses pengumuman properti lokal yang dilakukan oleh klien daya produk, dan kepala barang dagangan. Riset berikut mempunyai tujuan yang mana sebagaimana melihat inventarisasi punya daerah di Kota Malang. Lokasi penelitian ini terletak di Jalan Tugu 1 Kota Malang. Pada riset berikut memakai metode penelitian kualitatif, untuk mengumpulkan data pada riset berikut memakai metode wawancara, observasi dan mendokumentasikan. Sebagai menentukan informan memakai *Snowball Sampling*, dengan narasumber yang terdiri dari: Kepala Bidang Pemanfaatan, Staf Sub Bagian Penggunausahaan, dan Staf Sub Bagian Pengendalian. menganalisa data memakai reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulannya. Keabsahan data memakai triangulasi teknik. Dari hasil riset menunjukkan bahwasannya saya inventarisasi barang sudah melakukan catatan sesuai dengan aset kepunyaan Badan sehingga perubahan dan peralihan barang milik daerah bisa terpantau. Faktor pendukung tersedianya SDM dan fasilitas yang mendukung agar mengelola barang bisa lebih maksimal. Faktor penghambat tidak pasti atau jelasnya terkait status kepemilikan, pengamanan barang dan pengguna barang.

Kata kunci : Barang Milik Daerah, Inventarisasi Aset Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan pedoman Nomor 19 Tahun 2016 terkait Tata Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah. Barang milik daerah ialah semua barang dagangan yang dibeli atau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau diperoleh dari perolehan lain yang asli dan dikelompokkan menurut golongan barang milik daerah termasuk barang hasil bumi dan barang portabel.

Aset daerah ialah potensi moneter dan aset yang sangat penting dalam organisasi pemerintah terdekat, karena, jika sumber daya diawasi dengan tepat, mereka dapat menambah negara tetangga sebagai semacam pendapatan serta membantu pekerjaan dan kemampuan legislatif lingkungan sebagai kerjasama spesialis teritorial ke daerah setempat.

Aset daerah ialah aset moneter yang dikendalikan atau berpotensi diklaim oleh otoritas publik karena kejadian sebelumnya dan dari mana keuntungan finansial dan tambahan ramah di masa depan seharusnya diperoleh, baik oleh otoritas publik dan area lokal, dan dapat diperkirakan dalam satuan uang tunai, termasuk aset non-moneter yang penting untuk pengaturan administrasi untuk keseluruhan populasi dan aset yang disimpan untuk alasan yang dapat diverifikasi dan sosial.

Mengingat Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 terkait Penatausahaan Barang Milik Daerah dan Pedoman Imam Rumah Tangga Nomor 19 Tahun 2016 Terkait Aturan Pengawasan Sumber Daya Milik Daerah, maka masuk akal

bahwasannya sumber daya provinsi ialah sumber daya provinsi, baik yang bergerak maupun yang bergerak. dan produk mantap mulai dari pembelian. dengan cadangan yang diperoleh seluruhnya atau sebagian besar dari cadangan APBD atau kemungkinan perolehan asli lainnya untuk situasi ini misalnya (penghargaan, dan sebagainya) Sumber daya properti teritorial seperti struktur, perusahaan dan organisasi, struktur, perangkat keras dan perlengkapan, kendaraan furniture, dan arsip penting lainnya.

Mukarom (2015: 84) secara khusus standar pertolongan publik ialah kepastian waktu, pelaksanaan waktu, pelaksanaan administrasi publik, dapat selesai dalam jangka waktu yang telah ditentukan, siap melayani dengan cepat dan tepat. Pemenuhan kantor dan yayasan, seperti kerangka kerja, perangkat keras kerja, dan dukungan lain yang memuaskan ialah hal vital yang diperlukan dalam membantu siklus batuan.

Siklus stok, seperti bermacam-macam informasi, pencatatan, dan merinci efek samping dari bermacam-macam informasi pada properti provinsi ialah penting bagi organisasi. Efek samping dari siklus akuntansi dan stok diperlukan dalam menyelesaikan siklus pengungkapan properti teritorial yang dilakukan oleh pelanggan daya produk, dan pengawasan produk. Konsekuensi penyelenggaraan barang milik daerah dimanfaatkan untuk penyesuaian perencanaan pemerintahan daerah. Dengan organisasi yang sistematis, angka-angka yang tepat dan pasti akan disampaikan yang akan mempengaruhi aksesibilitas kumpulan data yang memuaskan dalam mengatur kebutuhan dan perencanaan dan juga akan membuat

sumber daya provinsi memberikan rincian terkait laporan akuntansi dengan angka-angka yang tepat dan tepat.

Sumber daya atau kelimpahan ialah modal sosial juga sebagai modal keuangan yang dapat dimanfaatkan sebagai mata air daerah membayar bantuan pemerintah. Sumber daya para eksekutif membutuhkan interaksi administrasi yang menggabungkan bagian dari mengatur, menyusun, membuat, dan mengendalikan dengan baik.

Ada beberapa teknik untuk mengawasi sumber daya/barang lokal dalam bekerja pada administrasi terbuka, secara spesifik adanya: tujuan dan sasaran jangka panjang yang terdiri dari pengaturan/perencanaan kebutuhan sumber daya, mengerjakan administrasi terbuka, pendekatan untuk bertindak dalam pengawasan sumber daya provinsi/ produk khususnya pemanfaatan sumber daya/harta kekayaan wilayah, jenis penggunaan sumber daya wilayah/barang dagangan, porsi aset meliputi: perolehan sumber daya/produk wilayah, spekulasi sumber daya/produk provinsi. Unsur-unsur represif dari sistem pengawasan sumber daya/produk kewilayahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, dianggap masih belum ideal, sebagai akibat dari: kurangnya kantor dan landasan dalam menawarkan jenis bantuan kepada daerah, kapasitas perangkat dalam mengawasi sumber daya/barang dagangan provinsi harus ditingkatkan, aset dalam mengawasi dan benar-benar fokus pada produk yang kurang mantap. (Adhitama dan Diana, 2019)

Sumber daya properti teritorial ialah salah satu penanda penting dalam menawarkan jenis bantuan publik. Selanjutnya salah satu upaya yang harus

dilakukan oleh majelis mekanik organisasi spesialis ialah mengerjakan administrasi sumber daya provinsi melalui stok sumber daya, stok yang diharapkan ialah melihat keadaan sumber daya dengan informasi sumber daya, klein sumber daya, dan penggunaan sumber daya. Berdasarkan landasan tersebut, dilakukan penelitian terhadap upaya yang dilakukan oleh otoritas publik dalam mengawasi sumber daya teritorial dengan judul:

“Inventarisasi Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang”.

1.2. Rumus Masalah

1. Bagaimana inventarisasi barang milik daerah di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung strategi pengelolaan aset atau barang milik daerah ?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui inventarisasi barang milik daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung strategi pengelolaan aset atau barang milik daerah dalam meningkatkan pelayanan publik.

1.4. Manfaat

Adanya riset berikut harapannya bisa memberikan yang bermanfaat seperti dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sumbangsih pola pikir dan sebagai bahan yang bisa dipertimbangkan dalam mengambil keputusan terkait strategi pengelolaan aset barang milik daerah.
- b. Hasil riset berikut diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan untuk ilmu administrasi publik, yang mana bentuk riset dari lapangan dan bisa memberikan pemahaman pengaplikasian disiplin ilmu yang mana didapat sejak kuliah.

2. Manfaat praktis

- a. Meningkatkan pengetahuan penulis dalam bidang aset serta wawasan penulis mengenai masalah-masalah pengelolaan aset barang milik daerah.
- b. Sebagai bahan rujukan maupun sebagai perbandingan bagi penelitian sejenis yang akan melakukan penelitian di kemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto. 2020. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fachrudin, Khaira Amalia. 2017. *Manajemen Aset*. USU Press. Medan.
- Handoko. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- Moleong, Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Salusu. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Wahyuni, Sri. 2020. *Pengantar Manajemen Aset*. Makasar: CV Nas Media Pustaka.
- Yusuf, M. 2015. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Cetakan Kedua. Salemba Empat: Jakarta.
- Zaenal, Mukarom & Muhibudin, Laksana. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Undang-Undang

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Terkait *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Terkait *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Undang-Undang Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Terkait *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 Terkait *Pengelolaan Barang Milik Daerah*.

Jurnal

Adhitama, M,O,& Diana. 2019. *Strategi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 8(2). 115-121

Suparman, N, & Arumsekarsari. 2018. *Pengelolaan Aset Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku*. Kelola: Jurnal Sosial Politik. 1(2). 74-97.

Internet

Peraturan Walikota. 2019. *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id>. 12 April 2022.

Peraturan Walikota. 2019. *Petunjuk teknik proses pengadaan, penggunaan, dan perencanaan kebutuhan aset*. Jdih.malangkota.go.id. 1 Maret 2019.